



Indonesia: Sebuah Tinjauan Umum

Indonesia adalah negara berbentuk republik yang terletak di bagian selatan kawasan Asia Tenggara. Dengan luas wilayah 1,9 juta kilometer persegi (lima kali lipat dari Jepang), Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil. Sekitar 9.000 pulau di antaranya dihuni oleh sekitar 230 juta (2008) penduduk, terbanyak keempat di dunia dan merupakan tempat tinggal bagi orang-orang dari berbagai suku dan agama yang hidup berdampingan. "Bhinneka Tunggal Ika" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu") merupakan semboyan nasional Indonesia.

Sejarah Pembangunan

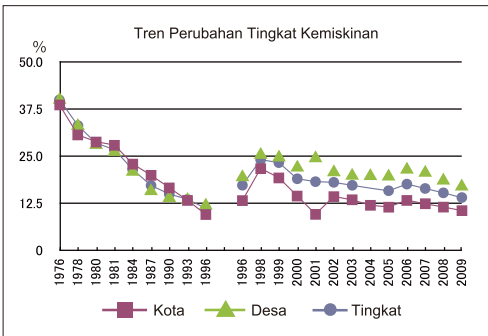
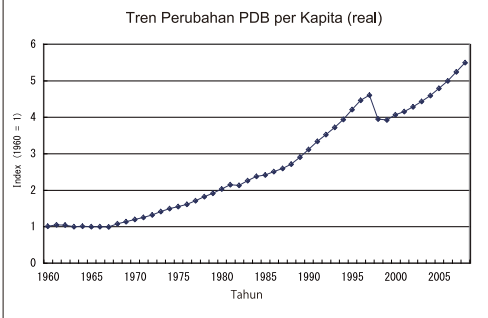
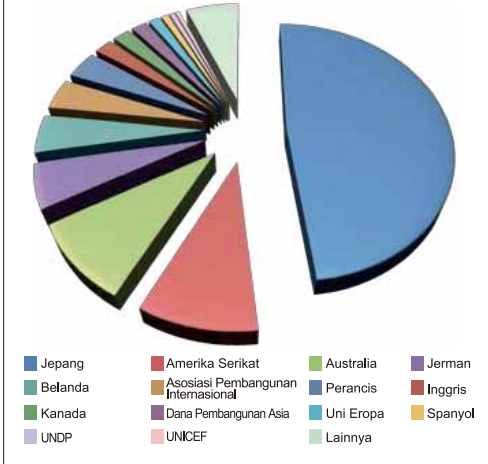
Saat ini Indonesia terus mengalami perkembangan dan stabil secara politik, serta sedang menjalankan berbagai reformasi, termasuk di dalamnya demokratisasi dan penanganan korupsi. Di panggung internasional, Indonesia merupakan anggota G20 dan telah menempatkan dirinya sebagai negara yang memiliki peranan penting dalam ASEAN.

Namun, bagi Indonesia, tidaklah mudah untuk sampai pada tahap ini. Sejak mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1945, di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia yang sedang berusaha membangun persatuan dan kesatuan negara baru, harus menghadapi berbagai gejolak politik dan ekonomi. Namun, pada masa itu pula Indonesia memprakarsai suatu gerakan internasional, yaitu menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika yang pertama.

Pada Maret 1968, Soeharto mengambil alih kepemimpinan dari Presiden Soekarno, dan sejak itu Presiden Soeharto memfokuskan pada aspek pembangunan, merealisasikan swasembada beras, meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan dasar, meningkatkan indikator kesehatan. Pada akhir 1980-an, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi akibat penurunan harga minyak bumi internasional yang merupakan sumber utama devisa, namun Indonesia berhasil melalui kesulitan itu dan memasuki era penyesuaian struktural untuk keluar dari pembangunan ekonomi yang bergantung pada minyak bumi. Pada era ini dilakukan pergeseran kebijakan dari substitusi impor ke promosi ekspor; melaksanakan kebijakan untuk keluar dari ketergantungan terhadap minyak bumi dan diversifikasi struktur ekspor. Upaya untuk mengurangi kesenjangan antar daerah pun lebih maju pada era ini.

Pada 1997, Indonesia yang mulai kembali berada di jalur pertumbuhan lagi-lagi berhadapan dengan krisis yang berdampak bagi ekonominya, yaitu krisis mata uang Asia yang bermula di Thailand. Dampak negatif dari krisis tersebut seiring dengan akumulasi berbagai permasalahan yang muncul dari kekuasaan terpusat selama 30 tahun, berakibat pada ketidakstabilan politik dan ekonomi Indonesia dan berakhirnya kepemimpinan Soeharto. Sejak itu, Indonesia melaksanakan berbagai proses reformasi dengan mendorong demokratisasi melalui amendemen konstitusi, seperti persamaan di hadapan hukum, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul, pemilihan langsung presiden oleh rakyat. Selain itu, desentralisasi juga dikembangkan pada masa ini dengan mendelegasikan sebagian besar kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat, dan sebagainya. Berbagai upaya di bidang reformasi ekonomi pun dilaksanakan. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan demokratisasi dan desentralisasi, namun upaya yang dilakukan selama ini – mulai dari Presiden B. J. Habibie, sampai dengan masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kedua ini, jelas telah menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.

Total Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) untuk Indonesia (Jumlah kotor)



Kerjasama JICA

JICA secara keseluruhan telah memberikan ODA kepada Indonesia sebesar 4,6261 triliun Yen¹. Dukungan untuk dua (2) sektor pembangunan, yaitu "pekerjaan umum dan pelayanan umum" (seperti transportasi, komunikasi, air dan sistem pembuangan, dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)) [1,7190 triliun Yen¹ atau 37%] dan "energi" [877,9 miliar atau 20%] mencapai 57% dari keseluruhan total ODA. Kemudian diikuti oleh dukungan terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan [371,3 miliar Yen atau 8%] dan sektor pertambangan dan manufaktur [249,6 miliar Yen atau 5%].

Dalam sejarah kerjasama JICA di Indonesia, pada saat kondisi sosial ekonomi Indonesia stabil, JICA memberikan dukungan dalam rangka menyelesaikan pembangunan Indonesia, seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia dan institusi. Sedangkan dalam masa krisis ekonomi dan keadaan darurat lainnya, JICA memberikan dukungan untuk menciptakan kestabilan sosial ekonomi, khususnya melalui Pinjaman Yen Non-Proyek².

Hasil dari Kerjasama dan Dukungan JICA

Kesuksesan pembangunan bangsa dan pembangunan sosial ekonomi Indonesia merupakan hasil upaya tak kenal lelah atas kemampuan masyarakat Indonesia sendiri. Namun, peran dan dukungan internasional, khususnya sepanjang perjalanan pembangunan Indonesia, tidak dapat diabaikan. Hasil dari 50 tahun dukungan JICA sebagai badan pelaksana ODA Pemerintah Jepang dapat dibagi menjadi empat kategori besar:

(1) Kontribusi dalam membangun stabilisasi kondisi sosial dan ekonomi
JICA telah mendukung Indonesia dalam menanggulangi berbagai krisis yang berkaitan dengan neraca pembayaran internasional dan neraca fiskal melalui penyediaan Pinjaman Yen Non-Proyek pada masa-masa ketidakpastian ekonomi, termasuk ketidakstabilan ekonomi di awal masa pemerintahan Soeharto pada akhir 1960-an, stagnansi harga minyak mentah internasional pada akhir 1980-an, dan krisis mata uang Asia pada akhir 1990-an. Selain itu, JICA juga telah mendukung peningkatan ketahanan pangan Indonesia, yang merupakan elemen penting bagi stabilitas nasional, melalui pengembangan infrastruktur dan kerjasama teknik yang difokuskan pada pembangunan irigasi. JICA juga telah memberikan kontribusinya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kerjasama teknik di bidang kesehatan, sanitasi, dan kesehatan ibu-anak. Selain itu, mengingat Indonesia merupakan negara yang vulkanis sehingga rawan gempa bumi, JICA juga memberikan dukungan untuk pencegahan serta pemulihan paska-bencana alam.

(2) Kontribusi dalam menciptakan fondasi pembangunan sosial dan ekonomi nasional
Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Oleh sebab itu, jaringan infrastruktur berperan sebagai fondasi untuk pembangunan ekonomi serta penghubung orang-orang dari satu pulau ke pulau lainnya. JICA telah berperan dalam pembangunan jaringan ini dengan memberikan dukungan penyusunan rencana induk dan dukungan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan melalui Pinjaman ODA. Selain itu, JICA tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi

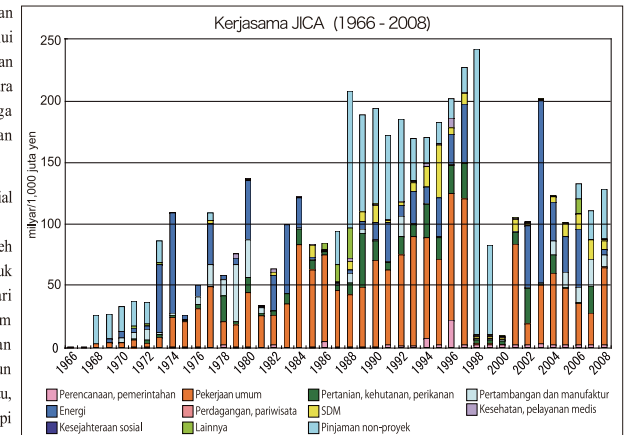


juga pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikan dan memelihara infrastruktur tersebut. Pada 1970-an, JICA memberikan dukungan secara intensif untuk pengembangan minyak dan gas alam yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membantu memperkuat keuangan Pemerintah Indonesia. Selain itu, beberapa tahun belakangan ini JICA telah mendukung pengembangan berbagai institusi yang penting bagi pengaturan dunia usaha. Dukungan JICA terhadap pendidikan dan peningkatan standar penelitian pada institusi pendidikan tinggi juga telah menjadi fondasi penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia.

(3) Penguatan kapasitas institusi pemerintah untuk mendukung pembangunan bangsa
JICA telah memberikan dukungan dalam bentuk kerjasama teknik kepada berbagai institusi pemerintah Indonesia yang berpijak dari perspektif jangka menengah dan panjang. Kerjasama tersebut selalu difokuskan untuk penguatan institusi, pengembangan SDM, dan pengembangan institusi sebagai langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Model kerjasama JICA – dengan melibatkan pertimbangan bersama dan kolaborasi dengan pihak Indonesia – telah membantu untuk membangun institusi dan SDM yang dapat terus mengembangkan diri walaupun telah berakhirnya kerjasama.

(4) Mendorong demokratisasi dan desentralisasi
Dalam menanggapi perkembangan Indonesia di bidang demokratisasi dan desentralisasi, JICA telah memberikan dukungannya untuk menyusun mekanisme secara konkrit yang sesuai dengan keadaan spesifik di Indonesia yang dikembangkan bersama-sama dengan para personil Indonesia berdasarkan pengenalan terhadap pengalaman di Jepang.

Kerjasama lebih dari 50 tahun yang telah dibangun, sejauh ini diyakini telah memberikan kontribusi dalam pembangunan Indonesia. Tentunya kerjasama dalam periode yang cukup panjang ini sekaligus dapat memperdalam interaksi dan saling pengertian di tingkat masyarakat. Hubungan bilateral yang erat ini merupakan aset penting dalam membangun basis kerjasama yang lebih luas antara Indonesia dan Jepang di masa depan.



1. Total kumulasi untuk periode antara 1966 sampai dengan 2008.
2. Berbeda dengan Pinjaman Proyek yang menyediakan dana untuk proyek pembangunan tertentu, Pinjaman Yen Non-Proyek menyediakan dana dalam rangka membantu negara tertentu meningkatkan neraca pembayaran asingnya atau melaksanakan rencana pembangunan ekonomi atau rencana penyesuaian struktural, dengan tidak menyebabkan suatu proyek dengan tujuan tertentu.